**PENEGAKAN HUKUM TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SURABAYA**

**Amanda Mulyasukma**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

mandalablade15@gmail.com

**Dr. Pudji Astuti, SH., MH.**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

toetche60@yahoo.co.id

Abstrak

Kekerasan sering sekali terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja melainkan juga terhadap anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dan ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, akan tetapi masih banyak kasus yang belum diselesaikan menyebabkan kasus kekerasan itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kasus kekerasan terhadap anak menduduki peringkat yang tertinggi di Jawa Timur berada di Kota Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya. Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dengan menggunakan wawancara dan data sekunder yang didapat melalui hasil penelitian ilmiah, internet, buku-buku, literatur dan Undang-undang. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan yaitu memakai metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian masih belum maksimal, penegakan hukum yang kurang maksimal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor penegak hukumnya (pihak kepolisian) dan faktor dari masyarakat. Pihak Kepolisian dianggap kurang mampu dalam mencari barang bukti dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Masih banyak masyarakat kurang sadar akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, sehingga masih banyak pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Tindak Kekerasan, Anak

**Abstract**

Violence often occurs among the community, not only in adults but also the children against. Violence that happened to child have been arranged and handled by Unit PPA Polrestabes Surabaya, But still many cases have not been resolved causing violence cases from year to year increasing. The case of violence against children was ranked highest in East Java in Surabaya. purpose in this research is to know conducted by the law enforcement unit Polrestabes PPA Surabaya to violence against children and the barriers. The method used in this study is juridical sociology and the study was conducted in Polrestabes Surabaya. This type of data is divided into two, primary data through interviews and second data obtained through the results of scientific research, the Internet, books, literature and law. Data processing techniques in this study using data reduction, data presentation and conclusion. The analysis technique used is wearing a qualitative descriptive method. The result showed that law enforcement conducted by the police is still not maximal, law enforcement is not maximally affected by two factors namely law enforcement factors (the police) and factors from the community. Police are considered less capable in finding evidence and handling cases of violence against children. Many people are still less aware of the importance of protecting children so that many perpetrators who do violence against children.

**Keywords:** Law Enforcement, Violence, Child.

# **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan masyarakat yang semakin berkembang dijaman sekarang ini, mengakibatkan banyak terjadi kesenjangan sosial salah satunya adalah kekerasan. Kekerasan tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja melainkan juga terjadi pada anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada anak dapat berupa perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, pengabaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan, atau kekuasaan.[[1]](#footnote-1) Salah satu contoh kekerasan fisik pada anak adalah aksi premanisme kakak kelas yang meminta uang kepada adik kelasnya, dimana jika kakak kelas tidak diberi uang yang diminta, maka adik kelas akan dipaksa memberi dengan ancaman atau bahkan dengan pukulan.

Kekerasan fisik terhadap anak selain contoh diatas juga didukung data dari pihak kepolisian yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel

Data Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Unit PPA

Satreskrim Polrestabes Surabaya

Tahun 2013 sampai Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TAHUN** | **JUMLAH DILAPORKAN** | **JUMLAH DISELESAIKAN** | **JUMLAH YANG DITANGANI** |
| 1 | 2013 | 106 | 77 | 29 |
| 2 | 2014 | 130 | 60 | 70 |
| 3 | 2015 | 123 | 70 | 53 |

Sumber : Unit PPA Polrestabes Surabaya

Tabel tersebut menggambarkan bahwa masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan belum tertangani. Kekerasan yang terjadi pada anak merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani, karena dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut akan langsung dirasakan oleh anak. Akibatnya anak akan menjadi penakut dan pendiam, anak akan mengucilkan diri dari pergaulan, anak akan mengalami stres dan depresi, menghambat tumbuh kembang dan kreativitas anak, karena dampak yang ditimbulkan itulah anak perlu dilindungi.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui jalur hukum dan dengan adanya ketentuan yang ditetapkan pada perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana dalam peraturan perUndang-Undangan.Adanya pengaturan mengenai perlindungan anak ini diharapkan kekerasan terhadap anak akan menurun. Hal ini dikarenakan anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminatif, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa seperti yang diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan juga dipertegas pada Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Anak

Perlindungan anak juga tercantum dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan tujuan tersebut sangat jelas bahwa anak merupakan tunas bangsa yang perlu untuk dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, selain itu anak juga merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya tujuan tersebut masih belum sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, meskipun sudah ada aturan mengenai perlindungan terhadap anak.

Aturan mengenai perlindungan kekerasan terhadap anak untuk memberikan sanksi dan juga untuk membuat pelaku kekerasan fisik terhadap anak menjadi jera telah diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Pasal 80 UU Perlindungan Anak menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan anak tersebut mengalami luka ringan, luka berat sampai meninggal. Isi dari Pasal 80 UU Perlindungan Anak sudah menunjukkan bahwa sanksi dan hukuman yang diberikan sudah cukup berat tetapi dalm kenyataannya masih banyak pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum dalam Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih belum maksimal karena jumlah kekerasan terhadap anak setiap tahunnya masih mengalami peningkatan dan penambahan jumlah kekerasan tersebut membuktikan bahwa pelakunya juga ikut bertambah.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam aturan-aturan yang baik serta tindakan sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.[[2]](#footnote-2) Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak didaerah Surabaya ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya. Penanganan yang dilakukan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak masih banyak yang belum terselesaikan dan mengakibatkan pelaku dari kekerasan semakin bertambah.

Permasalahan yang timbul berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah terkait bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Surabaya terhadap Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kekerasan Terhadap Anak oleh pihak Kepolisian di Polrestabes Surabaya dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya beserta hambatam yang dihadapi oleh pihak Kepolisian di Polrestabes Surabaya.

**METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[[3]](#footnote-3) Penulis mencari data di lapangan atau data primer yang menjelaskan data sekunder yang telah ada yaitu mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya terhadap kekerasan fisik yang dilakukan kepada anak-anak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Surabaya Ibu Ruth mengatakan bahwa peningkatan kasus kekerasan tersebut sering terjadi di beberapa wilayah Surabaya seperti di daerah Gubeng, Bratang, Wonokromo, Kenjeran, Dupak dan Peneleh. Kasus kekerasan yang ada di daerah-daerah tersebut juga tidak hanya kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

 Tugas dari Unit PPA secara umum adalah menangani segala bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat, sedangkan tugas khususnya yaitu untuk menangani kasus tindak pidana yang dialami oleh perempuan anak. Tugas dari Unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 4 Perkap No 10 Tahun 2007. Perkap No 10 Tahun 2007 berisi tugas khusus dari Unit PPA untuk menangani tindak pidana seperti UU Perlindungan Anak.

Korban dari kekerasan secara fisik pada umumnya mengalami pemukulan dan penganiayaan dari teman bermain korban, tetangga di dekat rumah korban maupun dari guru di tempat korban bersekolah, tetapi yang sering menjadi pelaku adalah dari tetangga dari korban. Anak korban dari kekerasan pada umumnya adalah anak yang lebih lemah dari pelaku sehingga ketika mengalami pemukulan dari pelaku anak tersebut tidak dapat melawan balik. Menurut Ibu Ruth bahwa Pihak Kepolisian sudah berupaya untuk mengantisipasi dan menanganinya, akan tetapi kasus kekerasan yang terjadi dimasyarakat semakin banyak. Penanganan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap pelakunya sudah sesuai dengan prosedur, pada umumnya prosedur yang digunakan sesuai dengan yang ada di Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena dalam hal ini yang menjadi korbannya anak maka akan ditangani oleh Unit PPA dan prosedur untuk penanganannya sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

Bagan

Alur Proses Penangan Kekerasan

Unit PPA Polrestabes Surabaya



 Menurut Ibu Ruth selain menangani tindak pidana pihak Kepolisian juga melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Upaya sosialisasi tersebut sudah dilakukan di daerah-daerah yang ada di wilayah Surabaya, meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetap saja ada laporan terkait dengan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel kekerasan yang terjadi di wilayah Surabaya sebagai berikut :

Tabel

Data Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Unit PPA

Satreskrim Polrestabes Surabaya

Tahun 2013 sampai Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TAHUN** | **JUMLAH DILAPORKAN** | **JUMLAH DISELESAIKAN** | **JUMLAH YANG DITANGANI** |
| 1 | 2013 | 106 | 77 | 29 |
| 2 | 2014 | 130 | 60 | 70 |
| 3 | 2015 | 123 | 70 | 53 |

Sumber : Unit PPA Polrestabes Surabaya

 Data kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA sudah ada yang diselesaikan tetapi untuk jumlah kasus masih diproses masih banyak juga. Hal ini dikarenakan terjadi masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Wilayah Surabaya dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang jumlahnya setiap tahun masih terbilang cukup banyak. Kasus kekerasan yang dilaporankan pada tahun 2014 sendiri lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 sendiri sudah mengalami penurunan tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali daripada tahun 2015. Pada bulan Oktober tahun 2016 jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan hampir sama dengan tahun 2015, jumlah tersebut dimungkinkan akan mengalami peningkatan lagi.

 Ibu Ruth juga mengatakan bahwasanya beberapa kasus belum selesai ditangani dikarenakan masih sulit untuk mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan kepada korban dikarenakan korban masih trauma, sehingga harus memerlukan waktu untuk meminta keterangannya. Selain itu kerjasama dari masyarakat dirasa juga kurang dalam memberikan informasi sehingga mengakibatkan pelaku semakin banyak. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kasus yang belum diselesaikan oleh Pihak Kepolisian.

Wawancara tidak hanya dilakukan kepada pihak kepolisian saja, tetapi juga kepada keluarga korban yaitu ibu kandung yang bernama Ibu Ria.[[5]](#footnote-5) Ibu Ria menjelaskan bahwasanya pada tanggal 23 Maret 2016 putrinya yang bernama anita telah mengalami pemukulan dari tetangga korban sendiri yang rumahnya tepat di belakang rumah korban. Awal mulanya ibu korban sedang berada di daerah Porong, Sidoarjo Jawa Timur untuk mengajar di sebuah sekolah, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Ibu Ria dihubungi oleh korban bahwasanya dia telah dipukul oleh tetangganya didepan gang rumah saat menunggu adik sepupunya pulang sekolah. Ibu Ria segera pulang untuk menemui korban dan meminta untuk menceritakan bagaimana kejadiannya. Berikut skema pelaporan yang dialami oleh Ria :

Bagan

Alur Proses Penanganan Kekerasan Fisik

Di Unit PPA Polrestabes Surabaya



Ibu Ria menjadi marah setelah mendengarkan kronologis yang disampaikan oleh anaknya dan kemudian membawa korban ke kantor polisi (Polrestabes Surabaya) untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh korban. Setelah mendapat laporan adanya dugaan kekerasan tersebut korban diperiksa dan di visum untuk mengetahui bahwa benar atau tidaknya telah mendapatkan kekerasan secara fisik. Selain melakukan visum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, Ibu Ria juga melakukan ronsen kepada anaknya sebagai bukti pendukung jika anaknya tersebut telah mendapatkan kekerasan dari pelaku.

Polisi melakukan pemanggilan kepada pelaku untuk dimintai keterangan terkait kasus kekerasan yang dilakukannya. Kekerasan terjadi dikarenakan sebelum melakukan pemukulan pelaku mempunyai rasa iri kepada keluarga korban. Ibu Ria juga mengatakan saat pelaporan tersebut awalnya ditangani dengan baik oleh polisi tetapi setelah beberapa hari pemeriksaan, pelaku tidak di ditahan oleh pihak kepolisian dan untuk mengantisipasi perbuatannya terulang kembali pelaku hanya dikenakan wajib lapor saja. Padahal pelaku mempunyai potensi untuk dapat melarikan diri serta mengulangi perbuatannya lagi hal tersebut yang membuat Ibu Ria menjadi kecewa.

Kekecewaan Ibu Ria tidak hanya sampai disitu saja tetapi juga untuk proses mengadilinya memerlukan waktu yang cukup lama yaitu hingga delapan bulan. Ibu Ria kemudian menanyakan kepada penyidik yang menangani penyebab lamanya penanganan tersebut dan yang lebih mengecewakan alasan lamanya penyidikan tersebut adalah hasil visum yang pernah dilakukan hilang. Padahal Ibu Ria sudah memberitahukan bahwasanya sudah melakukan ronsen dan bisa digunakan, tetapi polisi menolaknya. Selain itu korban hingga saat ini masih mengalami trauma akibat dari kekerasan yang dialaminya. Akhirnya Ibu Ria hanya bisa menunggu hingga prosesnya selesai dan diajukan ke Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti akan membahasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan bagi anak korban dari kekerasan fisik salah satunya dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, karena menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia yang mempunyai tugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Tugas tersebut berlaku untuk semua golongan yang ada di kalangan masyarakat, baik itu yang sudah dewasa maupun masih anak-anak dan digunakan sebagai langkah untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum tersebut dilakukan sebagai tujuan untuk menjalankan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang agar masyarakat dapat hidup tentram dan damai serta dapat mentaati aturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya maupun dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami mengenai aturan yang ada di dalam Undang-Undang.

Pelaku yang melakukan pelanggaran yang ada di dalam masyarakat pada kenyataannya masih banyak terjadi seperti pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak korban dari kekerasan secara fisik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang (dalam hal ini sebagai pelaku kekerasan) yang melakukan kekerasan terhadap anak akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun denda, tidak hanya pelaku yang melakukan kekerasan sendiri saja tetapi untuk pelaku yang menyuruh orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap anak itu juga akan mendapatkan sanksi.

Sanksi akan ditambah apabila anak yang menjadi korban mengalami luka berat sampai meninggal akibat dari kekerasan yang diterimanya dan juga yang melakukan kekerasan tersebut adalah orang tuanya. Jika pelanggaran yang terjadi tidak segera ditangani oleh aparat penegak hukum, maka akan menghambat tegaknya hukum terhadap Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan anak yang menjadi korban akan semakin bertambah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Surabaya AKP Ruth Yeni, Q, S.Sos bahwasanya masih banyak kasus kekerasan fisik terhadap anak-anak. Hal tersebut terbukti masih banyaknya pelaku yang melakukan kekerasan kepada anak dari laporan masyarakat sekitar yang masuk, terkait kasus penganiayaan terhadap anak didaerah Surabaya. Selain kasus kekerasan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, juga tidak sedikit dari masyarakat yang tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Pelaku kekerasan yang melakukan kekerasan terhadap anak seperti penganiayaan merupakan suatu tindak pidana secara khusus karena fisik anak jauh lebih lemah dan rentan dari pada fisik orang dewasa lainnya. Aturan yang digunakan untuk menangani pelaku yang melakukan kekerasan kepada anak-anak merupakan aturan khusus yaitu UU Perlindungan Anak, serta untuk sanksi kepada pelakunya sendiri akan diperberat hukumannya dikarenakan yang menjadi korbannya merupakan anak-anak. Pelaku yang melanggar ketentuan pada Pasal 76C UU Perlindungan Anak dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Polisi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan aturan perUndang-Undangan seharusnya dapat lebih berperan aktif lagi dalam menegakkan dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi membuat pelaku semakin bertambah meskipun sudah ada UU Perlindungan Anak, sehingga hal itu membuat pelaku tidak menjadi jera. Pasal 80 UU Perlindungan Anak belum dapat dijatuhkan kepada pelaku selama pelaku masih menjalani proses dikepolisian dan baru dapat dijatuhkan jika kasusnya sudah dilimpahkan kepengadilan. Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri menyebabkan penegakan hukum terhadap pasal 80 UU Perlindungan Anak menjadi kurang efektif, dikarenkan kasus yang belum terselesaikan dikepolisian masih cukup banyak.

Banyaknya kasus yang belum terselesaikan dapat dilihat dari tabel kekerasan fisik terhadap anak yaitu pada tahun 2014 masih terdapat 70 kasus yang belum terselesaikan dari 130 kasus yang dilaporkan dan tahun 2015 masih terdapat 53 kasus yang belum terselesaikan dari 123 kasus yang dilaporkan. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi dari tahun ketahun dan penanganannya yang masih kurang baik oleh pihak kepolisian, menyebabkan penegakan hukum Pasal 80 UU Perlindungan anak menjadi kurang efektif. Selain itu kewenangan untuk menegakkan aturan sesuai dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak yaitu dari proses penanganan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian dari pihak kepolisian mengemukakan bahwasanya pihak kepolisian sudah melaksanakan penanganan sesuai dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 seperti Laporan dari masyarakat yang diterima dan didata oleh SPKT. SPKT kemudian akan meneruskannya ke bagian URBIN untuk dicatat dan diberikan kepada Kasat Reskrim. Kasat Reskrim meneruskannya ke Kanit untuk melakukan penyelidikan. Unit yang bertugas untuk menyelidiki akan memanggil korban untuk dimintai keterangan dan barang bukti. Kepolisian melakukan visum untuk mengetahui apakah benar anak tersebut menjadi korban kekerasan atau bukan. Penyidik kemudian memanggil pelaku untuk mendapatkan keterangan dan menyamakan dengan keterangan yang diterima dari korban. Setelah mendapatkan cukup bukti, maka kasus akan diserahkan ke Pengadilan.

Pihak korban dan keluarga korban menyatakan proses penanganan dari kepolisian seperti. Keluarga korban (Ibu Ria) melaporkaan kejadian yang dialami korban (Anita) kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian mencatat laporan yang diberikan oleh keluarga korban. Keesokan harinya keluarga korban dipanggil beserta korban ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan dan melakukan visum dengan pihak kepolisian (unit PPA) di RS Bhayangkara. Setelah melakukan visum dan hasilnya terbukti telah menjadi korban kekerasan, pihak kepolisian memanggi tersangka untuk dimintai keterangan.

Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti diatas sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, sehingga untuk alur penanganannya sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 yang telah ditetapkan. Akan tetapi untuk penanganannya sendiri masih terbilang cukup lama yaitu pada saat penyidikan hingga pemberian berkas kepada JPU. Lamanya proses penanganannya tersebut hingga delapan bulan, seharusnya untuk penanganannya sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 paling lama hanya 120 hari (empat bulan). Hilangnya barang bukti juga menyebabkan proses penanganannya menjadi lebih lama, sehingga menghambat prosesnya yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat. Proses yang lama tersebut yang mengakibatkan keluarga korban menjadi kecewa akibat kinerja dari kepolisian kurang profesional dalam menangani pelaku.

Menurut Teori Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor. Berdasarkan kelima faktor yang diungkapkan Soerjono Soekanto dalam mempengaruhi penegakan hukum dan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Faktor dari penegak hukumnya yang dalam hal ini adalah Pihak Kepolisian dan faktor dari masyarakat.

Faktor dari penegak hukumnya, yaitu dari aparat keplisian yang menegakkan aturan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Aparat penegak hukum merupakan kalangan yang dianggap paling mengerti dan memahami aturan-aturan hukum serta dapat menyebarkan aturan hukum agar masyarakat dapat mengerti adanya aturan tersebut. Penegak hukum merupakan golongan panutan masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.[[6]](#footnote-6) Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabaes Surabaya bahwasanya pihak kepolisian sudah melakukan penangan terhadap laporan yang diberikan oleh keluarga korban yaitu penyelidikan untuk mengumpulkan barang bukti terkait dengan kekerasan yang dialami oleh korban, seperti halnya melakukan visum, meminta keterangan saksi dan korban. Proses pengumpulan barang bukti tidak hanya dipenyelidikan saja, tetapi dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya pelaku melakukan kekerasan tersebut.

Alur penanganan dari pihak kepolisian sendiri sudah sesuai dengan aturan tetapi untuk prosesnya masih cukup lama sehingga menyebabkan banyak dari pihak keluarga korban yang tidak puas dengan pelayanan tersebut. Proses penanganan yang lama salah satunya dikeranakan bukti yang seharusnya sudah dimiliki terkadang hilang ataupun bercampur dengan berkas lainnya, seperti visum yang sudah dilakukan oleh korban dan hasilnya dibawa oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti tetapi pada saat proses penyidikan hasil visum tersebut hilang. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak kepolisian mengatakan bahwa masih sulitnya untuk mendapatkan barang bukti terkait dengan kekerasan yang terjadi, hal tesebut tidak sesuai dengan hasil wawancara dari pihak korban yang mengemukakan bahwasanya hasil visum yang telah dilakukan hilang sehingga pemeriksaannya menjadi lebih lama.

Pemeriksaan terhadap korban yang masih mengalami trauma juga menjadi kendala lainnya dikarenakan untuk menangani korban yang masih trauma memerlukan kesabaran dan waktu agar korban dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialaminya tersebut. Upaya lain yang dilakukan juga hanya sebatas melakukan mediasi dan pelaku hanya dikenakan wajib lapor saja, sedangkan untuk pengawasan terhadap pelaku dilakukan hanya pada saat wajib lapor saja.

Penegakan hukum dapat diciptakan dari peranan pihak kepolisian yang lebih profesional lagi dalam melakukan pekerjaannya serta menangani kasusnya dengan cepat, sehingga dapat pelakunya dapat segera diadili dan tidak dapat bebas berkeliaran. Permasalahan penegakan hukum yang sering terjadi di Indonesia disebabkan karena dari aparat penegak hukumnya sendiri kurang menanggapi hal-hal yang terjadi dimasyarakat dan kurang profesional dalam bekerja, oleh karena itu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi didalam masyarakat sering sekali terulang kembali meskipun sudah pernah dilaporkan dan diproses secara hukum.

Faktor dari masyarakatnya sendiri juga menjadi salah satu penghambat dalam menegakkan hukum. Perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum didalam lingkungan masyarakat diperlukan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum.[[7]](#footnote-7) Apabila masyarakat yang sadar akan hukum sedikit maka hukum yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak dapat berjalan, seperti masyarakat yang kurang sadar untuk melindungi anak dan cenderung melakukan penganiayaan terhadap anak. Melanggar pasal 80 UU Perlindungan Anak merupakan perbuatan melawan hukum.

Tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti,[[8]](#footnote-8) Pengetahuan hukum; Pemahaman kaidah-kaidah hukum; Sikap terhadap norma-norma; Perilaku hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ruth kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu masih banyaknya pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dan juga masih banyak orangtua yang lalai dalam mengawasi anaknya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap UU Perlindungan Anak, serta ada juga yang mengabaikannya meskipun sudah diberikan sosialisasi. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya arti dari melindungi anak mengakibatkan kasus tersebut semakin bertambah. Masyarakat juga kurang mengerti akibat yang akan ditimbulkan apabila melakukan kekerasan kepada anak secara terus-menerus.

Hambatan lainnya yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu dari masyarakat yang kurang sadar hukum dikarenakan masyarakat masih enggan memberikan informasi atau melaporkan bila terjadi kasus kekerasan yang ada di daerahnya. Bila ada pelaku yang melarikan diri, masyarakat terkadang jarang ada yang mau memberikan informasi sehingga menyebabkan penangkapan pelaku yang kabur menjadi cukup lama.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kinerja dari pihak kepolisian yang kurang profesional dalam mendapatkan bukti danmenangani kasus kekerasan, penanganannya sendiri cukup lama hingga 8 bulan, padahal didalam perkap upaya penanganannya maksimal hanya 4 bulan. Selain itu masih banyak kasus kekerasan fisik yang belum diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan hukum Pasal 80 UU Perlindungan Anak yaitu dari Faktor Penegak hukumnya sendiri, pihak kepolisian seharusnya dapat lebih profesional dalam melakukan pekerjaannya dikarenakan dari keluarga korban merasa prosesnya teralu lama hingga 8 bulan, dengan alasan hilangnya barang bukti yaitu hasil visum korban. Selain itu untuk meminta keterangan dari korban yang trauma juga menjadi kendala, dikarenakan untuk meminta keterangan dari korban harus dilakukan secara bertahap sehingga korban dapat memberikan keterangan dengan lengkap. Faktor dari masyarakat yang kurang sadar akan arti penting untuk melindungi anak, terutama dari orangtua dan keluarga yang terkadang masih lalai menjaga anaknya sendiri. Selain itu masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan aturan mengenai hukum bahkan ada yang tidak melarikan diri setelah melakukan kekerasan.

**Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat memberikan saran yaitu Pihak kepolisian seharusnya lebih memaksimalkan kinerja dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sehingga penanganan kasusnya tidak melebihi batas 4 bulan. Penyelesaian pennganan dengan cepat dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kinerja pihak kepolisian serta dapat mengurangi jumlah pelaku kekerasan yang jera akibat dari hukuman yang diterimanya. Pihak kepolisian dapat lebih menjaga dan menyimpan barang bukti dengan baik, dikarenakan barang bukti sangat penting dalam proses penyidikan dan dapat digunakan untuk mendukung data pada waktu penyidikan.

Selain itu, untuk Masyarakat seharusnya dapat menambah wawasan mengenai aturan yang berlaku, orangtua juga seharusnya dapat lebih berperan aktif dalam melindungi dan menjaga anaknya agar tidak menjadi korban kekerasan. Masyarakat dapat membantu tugas dari dalam memberikan informasi terkait pelaku kekerasan kepada anak agar dapat memudahkan proses penyidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. (edisi revisi) Jakarta: Raja Grafindo.

Abdurrahman. 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Agus, Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Darma, Made Weda. 1966. *Kriminologi* (edisi pertama). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nuansa.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Sokento, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung: Cipta Karya.

 . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

 . 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 . 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 . 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan Ke-12). Jakarta: Rajawali Pers.

Soekresno, Emmy. 2007. *Mengenali Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nuansa.

Sudarsono. 2007. *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudjana, Nana. 2001. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi.* Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 127, Tambahan Lembaran Negara No. 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3258)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi dan Peranan UNIT PPA (Online), (<http://uppabareskrim.com/profil_cha.php>, diakses 25 Oktober 2016)

Imam Wahyudiyanta, *sejarah bangunan Polrestabes Surabaya* (Online), (<http://m.detik.com/news> /berita-jawa-timur/3041108/ini-sejarah-bangunan-polrestabes-surabaya, diakses 10 Oktober 2016)

Jakarta, HanTer (Online), ([http://harianterbit.com/m/ humaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-Pelaku-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat](http://harianterbit.com/m/%20humaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-Pelaku-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat), diakses 21 Maret 2016)

Perlindungan Anak. Iin Sri Herlina, “*Defenisi Kekerasan Terhadap Anak*”, 2010, (Online), (<http://iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak>, diakses 21 Maret 2016)

Surabayanews.co.id (Online), ([http://surabayanews.co.id/ 2015/03/19/19593/surabaya-tertinggi-kasus-kekerasan-anak.html](http://surabayanews.co.id/%202015/03/19/19593/surabaya-tertinggi-kasus-kekerasan-anak.html), diakses 21 Maret 2016)

Tempo.co, Jakarta (Online), ([http://m.tempo.co/read/ news/2016/06/01/](http://m.tempo.co/read/%20news/2016/06/01/)064775897/polisi-tangkap-baby-sister-pelaku-kekerasan-terhadap-anak.html*,* diakses 10 Juni 2016)

Tempo.co, Surabaya (Online), ([http://m.tempo.co/read/ news/2016/05/12/](http://m.tempo.co/read/%20news/2016/05/12/)063770486/kisah-mirip-YY-di-Surabaya-delapan-pelajar-cabuli-siswi-smp,diakses 13 Juni 2016)

1. Iin Sri Herlina. 2010. *Defenisi Kekerasan Terhadap Anak*. [internet] [http://iin-green.web.id/2010/05/08/ definisi-kekerasan-terhadap-anak/](http://iin-green.web.id/2010/05/08/%20definisi-kekerasan-terhadap-anak/). Diakses 21 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010, Hlm. 153-154. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasil wawancara Kanit PPA AKP Ruth Yeni, Q, S.Sos Satreskrim Polrestabes Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara dengan ibu korban kekerasan fisik, Ria Suhartiningsih pada tanggal 31 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 5 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hal. 40 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudarsono, 2007*, Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 66 [↑](#footnote-ref-8)